

KOORDINASI DINAS PERTANIAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PEMBUKAAN LAHAN TANI (BAWANG MERAH) DI KABUPATEN ENREKANG

Rahmat^{1*}, Muhlis Madani², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the work plan, meetings, communication and division of tasks at the Coordination of the Agricultural Service and the Regional Disaster Management Agency for the clearing of agricultural land (shallots) in Enrekang Regency. The research method used descriptive qualitative with a total of 3 informants including the Secretary of the Regional Disaster Management Agency of Enrekang Regency, the Secretary of the Agriculture Service and the Head of the Horticulture Division of the Enrekang Regency Agricultural Office. Collecting data used observation, interviews, and documentation. While the data analysis used data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the Coordination of the Agriculture Service and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Farming Land Clearing (onion) in Enrekang Regency that the work plan was prepared according to the needs of local farmers, meeting carried out at the office or at the farm location, communication was carried out in realizing the work plan that had been prepared and the division of tasks was carried out in accordance with the main tasks and work functions of each field.

Keywords: communication, division of tasks, meeting, work plan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana kerja, pertemuan, komunikasi dan pembagian tugas pada koordinasi Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pembukaan lahan tani (bawang merah) di Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 3 orang termasuk Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang, Sekertaris Dinas Pertanian dan Kabid Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pembukaan Lahan Tani (Bawang Merah) di Kabupaten Enrekang bahwa rencana kerja disusun sesuai dengan kebutuhan petani setempat, pertemuan dilakukan di kantor maupun di lokasi pertanian, komunikasi dilakukan dalam mewujudkan rencana kerja yang telah disusun serta pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing bidang.

Kata kunci: komunikasi, pembagian tugas, pertemuan, rencana kerja

* rahmat@gmail.com

PENDAHULUAN

Koordinasi merupakan proses menyetujui secara bersama dengan cara yang mengikat dari berbagai kegiatan-kegiatan ataupun unsur-unsur yang berbeda sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. Koordinasi (Alwi, 2018: 89), koordinasi dilakukan dengan pemerintah-pemerintah daerah yang terkait dalam jaringan pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi dilakukan, baik dalam hal pengambilan keputusan terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Menurut Sentika (2015) pada dasarnya proses koordinasi mempunyai unsur-unsur penting dalam pelaksanaannya, yang meliputi antara lain kesatuan tindakan, komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, berkesinambungan kontak langsung, hubungan timbal balik saling menghargai (*mutual respect*), kejelasan tujuan, rantai kewenangan mekanisme, pembagian peran dan kerja), manajemen internal, disiplin, dan komitmen pimpinan.

Harold Koontz (Herman, 2011) bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya: adanya rencana kerja, pertemuan-pertemuan, komunikasi, dan pembagian tugas kerja.

Usaha tani dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki, yang dikuasai sebaik-baiknya dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya menghasilkan keluaran atau output (Soekartawi, 2002).

Secara garis ada dua bentuk usaha tani yang telah dikenal yaitu usaha tani keluarga (*family farming*) dan perusahaan pertanian (*Plantation, estate, enterprise*). Pada umumnya yang dimaksud dengan usaha tani adalah usaha tani keluarga sedangkan yang lain adalah perusahaan pertanian (suratiyah, 2015).

Hernanto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani, yaitu faktor internal seperti unsur tanah,

air, iklim, luas lahan, identitas penguasa, pertanian, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, dan modal. Selain faktor internal juga terdapat faktor eksternal, yaitu tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, harga, sarana produksi, fasilitas kredit, dan penyuluhan.

Pembukaan lahan yang semakin menyeluruh menyebabkan banyaknya penebangan hutan yang secara tidak langsung selain mengganggu penduduk sekitar lahan pertanian dalam lingkup kecil (penduduk khususnya bertempat tinggal disekitar perkebunan dan akan merasakan dampak langsung penggunaan pestisida atau racun yang digunakan para petani bawang yang akan dihirup langsung dan mengganggu kesehatan). Selain itu juga akan mengganggu atau merugikan dal lingkup luas, dengan pembukaan lahan secara besar-besaran juga telah mengakibatkan mudahnya terjadi kerusakan alam.

Ketika hujan deras daerah yang telah diubah menjadi lahan pertanian bawang merah kini mudah mengalami masalah seperti banjir dan tanah longsor, yang mengganggu semua lapisan masyarakat karena diketahui jika terjadi bencana bukan hanya satu atau dua orang yang akan merasakan dampaknya, akan tetapi semua lapisan

masyarakat luas karena akan merembes dari suatu daerah ke daerah yang lain.

Bencana berasal dari bahasa Inggris “*disaster*” yang berakar dari kata latin “*disastro*”. *Disaster* berasal dari gabungan kata DIS yang berarti “negatif” dan ASTRO yang berarti “bintang” (*star*). Posisi bintang diyakini dapat mempengaruhi nasib manusia sehingga “*disastro*” berarti “nasib kemalangan” atau “tidak beruntung” (*unlucky*). Ada juga yang mengartikan “peristiwa jatuhnya bintang-bintang ke bumi” (Soemarno dalam Adiyoso, 2018: 20).

Menurut Nurjanah (2013: 21) terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yakni: 1) faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia, 2) faktor non-alam (*nonnatural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan 3) faktor sosial/manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, terdapat payung hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 3 angka 2 Tujuan penanggulangan bencana (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 4).

Di Indonesia, pengelolaan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). tugas BPBD tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 21. Lembaga ini sangat penting karena menguatkan pentingnya bencana dikelola oleh sebuah lembaga negara secara permanen dan khusus, namun menunjukkan perlunya koordinasi yang terpadu antar kementerian/lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme Penanggulangan Bencana yang dianut mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam 3 tahapan bencana yaitu, pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksanaan. Pada saat Darurat bencana bersifat koordinasi,

komando, dan pelaksana. Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana. Kegiatan prabencana dilakukan secara lintas sektor dan *multi stakeholder* oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi.

Menurut Sentika (2015) pada dasarnya proses koordinasi mempunyai unsur-unsur penting dalam pelaksanaannya, yang meliputi antara lain kesatuan tindakan, komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, berkesinambungan kontak langsung, hubungan timbal balik saling menghargai (*mutual respect*), kejelasan tujuan, rantai kewenangan mekanisme, pembagian peran dan kerja), manajemen internal, disiplin, dan komitmen pimpinan.

Harold Koontz (Herman, 2011) bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya: adanya rencana kerja, pertemuan-pertemuan, komunikasi, dan pembagian tugas kerja.

Usaha tani dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif

bila petani dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki, yang dikuasai sebaik-baiknya dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya menghasilkan keluaran atau output (Soekartawi, 2002).

Secara garis ada dua bentuk usaha tani yang telah dikenal yaitu usaha tani keluarga (*family farming*) dan perusahaan pertanian (*Plantation, estate, enterprise*). Pada umumnya yang dimaksud dengan usaha tani adalah usaha tani keluarga sedangkan yang lain adalah perusahaan pertanian (suratiyah, 2015).

Hernanto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani, yaitu faktor internal seperti unsur tanah, air, iklim, luas lahan, identitas penguasa, pertanaman, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, dan modal. Selain faktor internal juga terdapat faktor eksternal, yaitu tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, harga, sarana produksi, fasilitas kredit, dan penyuluhan

Pembukaan lahan yang semakin menyeluruh menyebabkan banyaknya penebangan hutan yang secara tidak langsung selain mengganggu penduduk sekitar lahan pertanian dalam lingkup kecil (penduduk khususnya bertempat tinggal disekitar perkebunan dan akan

merasakan dampak langsung penggunaan pestisida atau racun yang digunakan para petani bawang yang akan dihirup langsung dan mengganggu kesehatan). Selain itu juga akan mengganggu atau merugikan dal lingkup luas, dengan pembukaan lahan secara besar-besaran juga telah mengakibatkan mudahnya terjadi kerusakan alam.

Ketika hujan deras daerah yang telah diubah menjadi lahan pertanian bawang merah kini mudah mengalami masalah seperti banjir dan tanah longsor, yang mengganggu semua lapisan masyarakat karena diketahui jika terjadi bencana bukan hanya satu atau dua orang yang akan merasakan dampaknya, akan tetapi semua lapisan masyarakat luas karena akan merembes dari suatu daerah ke daerah yang lain.

Bencana berasal dari bahasa Inggris "*disaster*" yang berakar dari kata latin "*disastro*". *Disaster* berasal dari gabungan kata DIS yang berarti "negatif" dan ASTRO yang berarti "bintang" (*star*). Posisi bintang diyakini dapat mempengaruhi nasib manusia sehingga "*disastro*" berarti "nasib kemalangan" atau "tidak beruntung" (*unlucky*). Ada juga yang mengartikan "peristiwa jatuhnya bintang-bintang ke bumi" (Soemarno dalam Adiyoso, 2018: 20).

Menurut Nurjanah (2013: 21) terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yakni: 1) faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia, 2) faktor non-alam (*nonnatural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan 3) faktor sosial/manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat payung hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 3 angka 2 Tujuan penanggulangan bencana (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 4).

Di Indonesia, pengelolaan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). tugas BPBD tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 21. Lembaga ini sangat penting karena

menguatkan pentingnya bencana dikelola oleh sebuah lembaga negara secara permanen dan khusus, namun menunjukkan perlunya koordinasi yang terpadu antar kementerian/lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme Penanggulangan Bencana yang dianut mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam 3 tahapan bencana yaitu, pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksanaan. Pada saat Darurat bencana bersifat koordinasi, komando, dan pelaksana. Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana. Kegiatan prabencana dilakukan secara lintas sektor dan *multi stakeholder* oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi.

METODE

Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan, mulai dikeluarkannya surat izin penelitian sampai selesai, adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini di Kantor Dinas Pertanian, dan Kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, Penelitian ini dilaksanakan melalui tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa yang sifatnya terbatas serta ikut memberikan gambaran obyektif dari kondisi obyek yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti yaitu mengenai Koordinasi Dinas Pertanian dan BPBD dalam Pembukaan Lahan Tani (Bawang Merah) di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer, merupakan data yang didapatkan dari informan penelitian, yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait mengenai koordinasi BPBD dengan dinas pertanian terkait maraknya pembukaan lahan tani di Kabupaten Enrekang, sedangkan data sekunder, merupakan data pelengkap yang didapatkan dari informan, buku-buku, internet, yang dianggap bisa memberikan informasi terkait koordinasi BPBD dengan dinas pertanian terkait maraknya pembukaan lahan tani di Kabupaten Enrekang.

Teknik Penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan ialah menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini sebagai penjaring data primer tentang bagaimana koordinasi BPBD dengan dinas pertanian terkait maraknya pembukaan lahan tani di Kabupaten Enrekang.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif yaitu proses analisis yang dilaksanakan beriringan dengan proses pengumpulan data. Miles dan A.Michael Hurman dalam Sugiyono (2011:246).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai letak geografis kondisi lokasi penelitian dan tipografi, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan wilayah rawan bencana yang terdiri dari banjir dan tanah longsor.

Kawasan rawan longsor di Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Enrekang. Pada dasarnya ada dua faktor penyebab terjadinya tanah longsor antara lain: faktor pengontrol (internal) dan faktor pemicu (eksternal). Faktor pengontrol meliputi jenis litologi, hidrologi, soil/tanah, struktur geologi dan bentukan

morfologi, sedangkan faktor pemicunya terdiri dari kondisi tata guna lahan, curah hujan dan aktivitas manusia.

Kawasan rawan banjir di Kecamatan Cendana dan Kecamatan Enrekang. Banjir besar terjadi apabila air hujan cukup tinggi dan jatuh tersebar merata di seluruh daerah tangkapan air, kemudian berubah menjadi limpasan permukaan yang terkumpul secara cepat pada suatu titik keluaran (outlet). Faktor alami daerah tangkapan air merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan limpasan permukaan dari seluruh daerah tangkapan air untuk bisa terkumpul secara bersama-sama di titik keluaran.

Dinas Pertanian

Kantor Dinas Pertanian daerah Kabupaten Enrekang, provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Pertanian ini berfungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Selain itu, dinas pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutus kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga

penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. Selain itu, dinas pertanian juga adalah penjamin kesejahteraan petani melalui program memastikan memberikan asuransi usaha tani padi (AUPT). Oleh karenanya, terkait dengan fungsi dan tugasnya, dinas pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang adalah: “Mewujudkan Pertanian Tangguh, Berwawasan Agribisnis, Ramah Lingkungan, dan Religius”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Berdasarkan hasil pembahasan dan musyawarah seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka disepakati untuk menetapkan Visi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Governance yaitu: “Mewujudkan ketangguhan Masyarakat Kabupaten Enrekang Dalam Menghadapi Bencana”.

Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial organisasi, telah menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi yang bersangkutan.

Perencanaan perlu dilaksanakan mengingat adanya ketidakpastian akibat pengaruh dinamika lingkungan yang dihadapi. Perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai rencana kerja dalam Koordinasi Dinas Pertanian dengan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pembukaan lahan tani (bawang merah) di Kabupaten Enrekang adalah pada dasarnya Dinas Pertanian dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pernah melakukan rencana kerja khususnya pada tahun 2020 dimana bentuk kerjasama yang dilakukan berupa pengadaan alat yang dapat digunakan petani (bawang merah) dalam pengolahan pertanian. Hal ini dilakukan sehubungan dengan dampak virus corona yang terjadi di tahun 2020.

Penyusunan rencana kerja yang dilakukan Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentunya memperhatikan kebutuhan petani, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2020 diberikan alat kebutuhan pertanian. Bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk alat pertanian tetapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan petani.

Pertemuan-Pertemuan

Pertemuan merupakan forum yang sangat penting untuk menghimpun penyelesaian permasalahan. Pertemuan dapat dilakukan oleh pimpinan dengan stafnya tetapi dapat pula dilakukan diantara staf sendiri untuk menyusun usulan bahkan pertemuan pleno yang dapat mempertemukan semua unsur yang ada.

Pertemuan yang dimaksudkan dalam penelitian terkait diskusi yang dilakukan dinas pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mewujudkan rencana kerja yang telah disusun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai diskusi langsung Tim Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan para petani (bawang merah) mengenai keluhan atau pun terkait kebutuhan petani menjelaskan bahwa Secara bersama-sama pada tahun 2020 Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terjun langsung ke lokasi pertanian untuk melihat kegiatan pertanian, dan menanyakan kebutuhan pertanian masyarakat, sehingga di waktu yang sama pada tahun tersebut diberikan bantuan berupa peralatan pertanian.

pertemuan-pertemuan dalam Koordinasi Dinas Pertanian dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap pembukaan lahan tani (bawang merah) di Kabupaten Enrekang dilakukan berupa pemantauan terhadap kebutuhan pertanian, sehingga dengan kegiatan tersebut Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memberikan bantuan sesuai dengan

kebutuhan petani bawang merah setempat.

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai komunikasi dalam Koordinasi Dinas Pertanian dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pembukaan lahan tani (bawang merah) di Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa jika terdapat program kerja yang sama tentu kami selalu berkoordinasi dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Program kerja terlaksana dengan baik. Lahan yang digarap oleh warga terpantau cukup aman, dan jika terdapat lahan yang telah di pantau oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, warga setempat cukup patuh terhadap larangan yang disampaikan. Apalagi penyampaian tersebut berdampak pada keselamatan dan penghasilan warga.

Pembagian Tugas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pembagian tugas dalam Koordinasi Dinas Pertanian dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pembukaan lahan tani (bawang

merah) di Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa biasanya diawali dengan proposal dan kuesioner yang diberikan kepada Dinas Pertanian. Proposal itu nantinya yang akan ditindak lanjuti sesuai dengan pembagian tugas masing-masing bidang.

Setelah proposal disetujui dari Dinas Pertanian, kemudian diserahkan kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan memproses tujuan dari proposal tersebut. Baik berupa bantuan alat pertanian dll.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Rencana Kerja dalam koordinasi dinas pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pembukaan lahan tani (bawang merah) di Kabupaten Enrekang pernah terjadi dalam bentuk mewujudkan rencana kerja yang telah disusun berupa bantuan alat pertanian sesuai dengan kebutuhan petani (bawang merah setempat).

Pertemuan-pertemuan dalam koordinasi Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

terhadap pembukaan lahan tani (bawang merah) di Kabupaten Enrekang dilakukan dalam merealisasikan rencana kerja yang telah disusun. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor maupun di lokasi pembukaan lahan tani (bawang merah) di Kabupaten Enrekang

Komunikasi dalam koordinasi Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pembukaan lahan tani (bawang merah) di Kabupaten Enrekang berlangsung dengan baik untuk membahas setiap rencana kerja yang saling berkaitan.

Pembagian tugas dalam koordinasi Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pembukaan lahan tani (bawang merah) di Kabupaten Enrekang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing bidang.

REFERENSI

- Alwi. (2018). *Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan (Tantangan dan Strategi Dalam Penentuan dan Implementasi Kebijakan)*. Makassar: Kedai Buku Jenny.
- Herman, S., & Suryadi, H. (2011). *Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Pencegahan dan Pengendalian Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2011*. Diperoleh dari <https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/1401>

- Hernanto, F. (2007). *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Nurjanah, R. (2013). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Alfabeta.
- Sentika, T. B R. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Soekartawi. (2002). *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suratiyah, K. (2015). *Ilmu Usaha Tani*. Edisi Revisi. Jakarta: Penebar Swadaya.